

**SAMBUTAN BUPATI SAMBAS**  
**Ir. H. BURHANUDDIN A. RASYID**

**PADA ACARA PENGANTAR PENYAMPAIAN LKPJ**  
**BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2008**

**ASSALAMU'ALAIKUM                      WARAHMATULLAHI**  
**WABARAKATUH.**

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA

MENGAWALI PIDATO PENGANTAR PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2008 SAYA MENGAJAK KEPADA HADIRIN SEKALIAN UNTUK SELALU MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA ATAS LIMPAHAN NIKMAT, KARUNIA DAN RIDHO-NYA SEHINGGA KITA SEMUA DAPAT HADIR DISINI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT SERTA DIBERIKAN KEKUATAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN YANG TELAH DIEMBANKAN KEPADA KITA SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT.

DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI PULA SAYA MENGHIMBAU KEPADA HADIRIN SEMUA MARILAH KITA TUNDUKKAN SEJENAK KEPALA KITA UNTUK BERDO'A DAN MEMOHON AMPUN KEPADA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA ATAS SEGALA PERBUATAN YANG TELAH KITA LAKUKAN SEHINGGA KITA BANGSA INDONESIA DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI TIDAK HENTI-HENTINYA MENDAPAT BENCANA BAIK BENCANA ALAM MAUPUN BENCANA YANG DIAKIBATKAN OLEH ULAH KITA SENDIRI. KITA SEMUA BERHARAP SEMOGA BADAI BENCANA CEPAT BERLALU DAN MEMBERIKAN HARAPAN DAN SEMANGAT BARU DALAM MELANJUTKAN TUGAS PEMBANGUNAN DEMI MENSEJAHTERAKAN RAKYAT.

**SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA SERTA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2008 YANG SAYA SAMPAIKAN MERUPAKAN SALAH SATU KEWAJIBAN KAMI SELAKU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG – UNDANG

NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT. DISAMPING ITU LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN INI MERUPAKAN SARANA UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SECARA AKURAT DAN MENYELURUH MENGENAI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN SELAMA TAHUN 2008, HASIL YANG DIPEROLEH SERTA BERBAGAI KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAANNYA DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN JUGA MERUPAKAN ALAT UNTUK MELIHAT KESINAMBUNGAN DAN KONTINUITAS PROGRAM DAN

KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DALAM UPAYA MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, SERTA MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2006 – 2011.

BAGI PEMERINTAH PUSAT, PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SETIAP TAHUNNYA AKAN DIEVALUASI DAN DINILAI TINGKAT KEBERHASILANNYA. SELAIN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, KEDEPAN PEMERINTAH AKAN MELAKSANAKAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD, TERKAIT WAKTU, MATERI MAUPUN SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DAERAH.

**SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT,**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN PADA DASARNYA MERUPAKAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, YANG KEMUDIAN MENJADI CERMINAN KINERJA KEPALA DAERAH DALAM KURUN WAKTU 1 TAHUN ANGGARAN YANG DIUKUR BERDASARKAN TOLOK UKUR KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN BERSANGKUTAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH LAINNYA YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN DPRD.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN INI, DIMAKSUDKAN SEBAGAI PELAKSANAAN SISTEM DEMOKRASI DALAM TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA, MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN GUNA MENCIPTAKAN **GOOD GOVERNMENT, GOOD GOVERNANCE** DAN **CLEAN GOVERNMENT** DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,

PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN YANG PADA AKHIRNYA AKAN DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN INI SELANJUTNYA DIBAHAS OLEH DPRD SECARA INTERNAL SESUAI DENGAN TATA TERTIB DPRD YANG HASILNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD. KEPUTUSAN DPRD TERSEBUT BERSIFAT REKOMENDASI BAGI KEPALA DAERAH UNTUK PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEDEPAN.

**SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT,**

IJINKAN TERLEBIH DAHULU SAYA MENYAMPAIKAN TANGGAPAN BERUPA TINDAK LANJUT MENGENAI REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN OLEH DPRD KABUPATEN SAMBAS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2007 YANG

DISAMPAIKAN PADA TANGGAL 27 MARET 2008. SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS REKOMENDASI YANG DIBERIKAN TERSEBUT, KARENA HAL INI MERUPAKAN MASUKAN YANG SANGAT BERTARAF DARI DPRD KABUPATEN SAMBAS BAGI PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS. REKOMENDASI INI JUGA MERUPAKAN KOREKSI DAN EVALUASI TERHADAP KEKURANGAN DAN HAMBATAN YANG DIRASAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, SERTA MELANJUTKAN KEBERHASILAN YANG TELAH DIPEROLEH SELAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

DALAM URUSAN PENDIDIKAN, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ANTARA LAIN :

1. PERMASALAHAN GURU DI KABUPATEN SAMBAS ADALAH BELUM MERATANYA PENYEBARAN GURU DI TIAP SEKOLAH DAN KURANGNYA GURU UNTUK MATA PELAJARAN TERTENTU. ATAS PERMASALAHAN TERSEBUT, TELAH

DIPROGRAMKAN ROTASI / MUTASI GURU DAN SETIAP PENGANGKATAN GURU DIPRIORITASKAN UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH BARU MAUPUN SEKOLAH DI DESA / PEDALAMAN YANG SANGAT KEKURANGAN GURU.

2. PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL DALAM KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DITENTUKAN OLEH SEKOLAH MASING – MASING. TERMASUK MENENTUKAN STANDAR KOMPETENSI, STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN SESUAI DENGAN PERMENDIKNAS NO. 24 TAHUN 2006. KHUSUS UNTUK SEKOLAH DASAR DIRENCANAKAN AKAN DITENTUKAN 3 MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL UNTUK TAHUN PELAJARAN 2009/2010, ANTARA LAIN : BAHASA DAERAH (MELAYU SAMBAS) DAN BAHASA ASING (INGGRIS, ARAB, MANDARIN), TEKNOLOGI / INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI, SERTA BUDIDAYA PERTANIAN.
3. SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMBERDAYAKAN KOMITE SEKOLAH ANTARA LAIN PELATIHAN DAN BIMBINGAN MELALUI KEGIATAN P2DTK. FUNGSI PENGAWAS DAN PENILIK SELALU DIOPTIMALKAN

DENGAN DIADAKANNYA RAPAT – RAPAT PEMBINAAN SECARA BERKALA DAN MENGUPAYAKAN PENINGKATAN MOBILITASNYA.

4. TINDAK LANJUT YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TERHADAP STATUS UNIVERSITAS TRIBUANA TUNGGADDEWI MALANG DI KELAS SAMBAS ADALAH DENGAN TIDAK MELANJUTKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU KHUSUSNYA PROGRAM STRATA 1 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU HUKUM POLITIK, DENGAN PERTIMBANGAN KUOTA / JUMLAH ALUMNI KEDUA PROGRAM TERSEBUT SUDAH MEMENUHI KEBUTUHAN DAERAH SEBAGAIMANA SURAT BUPATI SAMBAS KEPADA REKTOR UNIVERSITAS TRIBUANA TUNGGADDEWI MALANG NOMOR 892/392/BKD-B TANGGAL 7 MEI 2007.
5. LEMBAGA PAUD NON FORMAL BERJUMLAH 75 (TUJUH PULUH LIMA) LEMBAGA YANG TERSEBAR DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SAMBAS, DENGAN JUMLAH WARGA BELAJAR SEBANYAK 1.786 ORANG, TENAGA PENDIDIK SEBANYAK 157 ORANG DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERJUMLAH 75 ORANG DENGAN SALAH SATU FUNGSI ADALAH SEBAGAI

PENGELOLA. DALAM RANGKA PERLUASAN AKSES SERTA PENCITRAAN PUBLIK TELAH DILAKSANAKAN SOSIALISASI KE KECAMATAN – KECAMATAN TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. DALAM RANGKA PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK TELAH DIADAKAN PELATIHAN TUTOR PAUD. DAN PADA TAHUN 2008 TELAH DIANGGARKAN PROGRAM PENINGKATAN PAUD YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMBAS.

6. KAMI MENYAMBUK BAIK SARAN PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN BAGI GURU WIYATA BHAKTI, NAMUN KARENA KETERBATASAN DANA MAKA HONOR GURU WIYATA BHAKTI PADA SAAT INI BELUM DAPAT DITINGKATKAN.
7. PEMBINAAN KEPADA KEPALA SEKOLAH / GURU / PENGELOLA KEUANGAN DI SEKOLAH / DINAS SELALU DILAKUKAN SEHINGGA PENGELOLAAN KEUANGAN DAPAT DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. DISAMPING ITU PEMERIKSAAN BERKALA YANG DILAKUKAN INTERNAL KABUPATEN SELALU DISERTAI DENGAN PEMBINAAN.

8. TERKAIT REKOMENDASI AGAR DI BIDANG PENDIDIKAN TIDAK TERLALU FOKUS PADA SEKTOR PEMBANGUNAN FISIK, DI SETIAP SEKOLAH TERDAPAT 3 SEKSI DALAM MENGELOLA PEMBANGUNAN FISIK SERTA PENINGKATAN MUTU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA.
9. TENTANG POLITEKNIK TERPIKAT SAMBAS, TERKAIT DENGAN PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAYAR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS ADALAH KEGIATAN ANALISIS KELAYAKAN UNTUK MENDIRIKAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN, AGRONOMI DAN MANAJEMEN INFORMATIKA SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN OPERASIONAL DARI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DI JAKARTA. KEGIATAN ANALISIS KELAYAKAN TERSEBUT DILAKUKAN OLEH POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK. BEBAN BIAYANYA TELAH DIANGGARKAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TERDAPAT DALAM DPA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SAMBAS, YAITU KEGIATAN TECHNICAL ASISTENSI POLITEKNIK TERPIKAT SAMBAS.

DALAM URUSAN KESEHATAN, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. DALAM PENYEDIAAN TENAGA MEDIS DI SENTRA PELAYANAN KESEHATAN, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS SELALU MELAKUKAN KOORDINASI DALAM PENEMPATANNYA.
2. PENANGANAN PENYAKIT MENULAR TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN. UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH, TELAH DILAKUKAN FOGGING (PENYEMPEROTAN) SERTA ABATESASI DI DAERAH-DAERAH YANG BERPOTENSI BESAR DEMAM BERDARAH. DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT SECARA UMUM, TELAH DILAKUKAN IMUNISASI MELALUI BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS), IMUNISASI WANITA USIA SUBUR (WUS) DAN IMUNISASI DASAR. KHUSUS PENDERITA HIV / AIDS, PENANGANANNYA

DILAKUKAN OLEH KLINIK VCT "GUNUNG GAJAH" DAN KLINIK VCT "CAHAYA". PADA TAHUN 2008, JUMLAH PENDERITA HIV / AIDS YANG DITANGANI BERJUMLAH 35 ORANG.

3. DALAM MENANGANI PERMASALAHAN GIZI BURUK, AKAN DIBENTUK PUSAT PEMULIHAN GIZI BURUK YANG BERTUJUAN MENURUNKAN GIZI BURUK YANG ADA DI KABUPATEN SAMBAS
4. TERKAIT DENGAN DANA TALANGAN UNTUK RUMAH SAKIT, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TIDAK BISA MEMBERIKAN, MENGINGAT HAL INI TIDAK DIPERKENANKAN DALAM KETENTUAN. HAL YANG DAPAT DILAKUKAN ADALAH DENGAN MELAKUKAN PROSES PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD SESUAI JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN. DALAM RANGKA KELANCARAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PADA AWAL TAHUN DIBERIKAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SKPD SEBAGAI UANG MUKA KERJA. SELAIN ITU, SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN, PENCAIRAN DANA DAPAT DILAKUKAN LEBIH DARI 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) BULAN, SEPANJANG DANA YANG TELAH

DIBERIKAN SEBELUMNYA  
DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

DALAM URUSAN OTONOMI DAERAH, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. PENGAWASAN TERKAIT DENGAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DILAKUKAN MELALUI PEMERIKSAAN REGULER DENGAN MEMANFAATKAN TENAGA PEMERIKSA YANG ADA, YAITU SEBANYAK 17 ORANG.
2. DALAM PEMBINAAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH, FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL TELAH DILAKUKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005. SEJALAN DENGAN ITU, SESUAI DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1989 YANG DIKUTI KEP MENPAN NOMOR KEP/46/M.PAN/2004, DALAM UPAYA LEBIH MEMANTAPKAN DAN MEMBERDAYAKAN APARATUR, PEMBINAAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB ATASAN LANGSUNG PADA MASING-MASING INSTANSI.

3. DALAM MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, KHUSUSNYA DI KECAMATAN, BUPATI SAMBAS MELALUI SURAT NOMOR 140/440.a/TAPEM-C TANGGAL 2 SEPTEMBER 2008 TELAH MENGINSTRUKSIKAN AGAR SETIAP PERMASALAHAN YANG MENYANGKUT PEMERINTAHAN DESA TERLEBIH DAHULU DIUPAYAKAN PENYELESAIANNYA DI KECAMATAN SEBELUM DILANJUTKAN KE KABUPATEN.
4. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TELAH DIUPAYAKAN SELALU DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN ATURAN YANG ADA DENGAN MENYELARASKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN. DISAMPING ITU, PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP PRODUK HUKUM YANG ADA TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERUS DILAKUKAN SEPERTI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
5. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TELAH DIUPAYAKAN MENGAKOMODIR BERBAGAI

KEBUTUHAN. KETERBATASAN YANG DIHADAPI MEMERLUKAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM MENENTUKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN AGAR KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TEPAT SASARAN DAN DAPAT MENGAKOMODIR KEBUTUHAN YANG ADA.

6. TERKAIT PENANGANAN ASET ATAU BARANG DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS AKAN MELAKSANAKAN MANAJEMEN ASET YANG TERDIRI ATAS 5 TAHAPAN KERJA, YAITU INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT, PENILAIAN ASET, OPTIMALISASI ASET DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIMA). DALAM MENDUKUNG PELAKSANAANNYA, AKAN DIADAKAN BIMBINGAN TEKNIS MENGENAI PENGELOLAAN ASET UNTUK APARATUR YANG MENANGANI ASET. MENINGAT KETERBATASAN ANGGARAN, PADA TAHUN 2009 AKAN DILAKSANAKAN TAHAPAN PERTAMA, YAITU INVENTARISASI ASET.
7. DALAM UPAYA AGAR PEMERINTAHAN DESA MELAKSANAKAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI KEUANGAN SESUAI ATURAN,

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TELAH MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT HAL INI KEPADA SELURUH PERANGKAT DESA DAN BPD. SELAIN ITU, BIMBINGAN JUGA DIBERIKAN PADA SAAT PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

8. DALAM PENEMPATAN PEJABAT STRUKTURAL PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TETAP MENGACU PADA KEAHLIAN, KETERAMPILAN, DAN PENDIDIKAN APARATUR.
9. PENGALOKASIAN ANGGARAN PADA TIAP SKPD TELAH DIUPAYAKAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RKPD DAN KUA APBD YANG DISEPAKATI DAN DIBAHAS BERSAMA OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD.
10. UNTUK MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN BEBAN KERJA, PEMUTASIAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS SELALU MENGUTAMAKAN KOORDINASI DENGAN KEPALA SKPD DALAM RANGKA MEMPERLANCAR PELAKSANAAN TUGAS PADA SKPD BERSANGKUTAN.

11. TERHADAP MASUKNYA ASPIRASI PEMEKARAN DESA, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TELAH BERUPAYA MEMBERIKAN PAYUNG HUKUM UNTUK PELAKSANAANNYA MELALUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

12. TERKAIT PEMBENTUKAN PAYUNG HUKUM BERKENAAN DENGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, TATA RUANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN, DAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN, DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA TANGGAL 14 NOPEMBER 2008, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PADA TAHUN 2009 MERENCANAKAN MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAANNYA.

13. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA ADALAH DENGAN MEMBERIKAN PELATIHAN UNTUK MEMBUKA WAWASAN DAN MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA MANDIRI SEHINGGA DAPAT MENJADI TENAGA KERJA YANG HANDAL

14. MENYIKAPI PERSOALAN HUMAN TRAFFICKING, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TELAH MEMBENTUK TIM GUGUS TUGAS, YANG SALAH SATU TUGASNYA ADALAH MELAKUKAN SOSIALISASI BERKAITAN DENGAN HUMAN TRAFFICKING INI.

DALAM URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER DAYA OLAHRAGA, PEMERINTAH TELAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN KOMPETISI OLAHRAGA DARI TINGKAT KECAMATAN HINGGA NASIONAL MELALUI EVEN-EVEN OLAHRAGA PELAJAR, YAITU PORSENI, POPDA, POPWIL DAN PORNAS.
2. DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA OLAHRAGA, TELAH DILAKUKAN PEMBINAAN KLUB-KLUB OLAHRAGA DI TINGKAT KECAMATAN SERTA PEMBINAAN OLAHRAGA DARI TINGKAT SD, SMP HINGGA SMA DAN SMK.
3. DALAM MENDUKUNG KEMAJUAN OLAHRAGA, TELAH DIBUAT KEBIJAKAN DENGAN

MEMBERIKAN BANTUAN ALAT-ALAT OLAHRAGA KE SEKOLAH-SEKOLAH.

4. MELALUI DANA YANG TERSEDIA, TELAH DISUSUN DAN DIJALANKAN PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA UPAYA PENCAPAIAN PRESTASI BAIK DI TINGKAT KECAMATAN MAUPUN KABUPATEN.
5. UPAYA PENGADAAN FASILITAS OLAHRAGA KHUSUSNYA GEDUNG DAN LAPANGAN OLAHRAGA YANG MEMADAI SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN PADA ATLET YANG BERPRESTASI SAAT INI BELUM BISA DILAKSANAKAN KARENA TERBENTUR PADA KETERBATASAN DANA.

DALAM URUSAN PENANAMAN MODAL, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2008 TELAH DIBENTUK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU. DENGAN ADANYA BADAN INI, URUSAN PENANAMAN MODAL YANG MELIPUTI PENANAMAN MODAL, PENDATAAN PENGENDALIAN DAN MONITORING EVALUASI

SERTA PELAYANAN PERIZINAN MENGGUNAKAN SISTEM SATU PINTU.

2. UNTUK PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN DEPOSIT INVESTASI BAGI INVESTOR PADA TAHUN 2008 TELAH DIUSULKAN KEMBALI UNTUK MASUK PADA PROGRAM PRIORITAS RENCANA LEGISLASI.
3. TERKAIT SELEKSI TERHADAP INVESTASI YANG AKAN MASUK, DENGAN TELAH DILAKSANAKANNYA PERIJINAN SISTEM SATU PINTU DIHARAPKAN PROSES SELEKSI IJIN NANTINYA AKAN LEBIH BAIK YANG DILANJUTKAN DENGAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP IJIN YANG TELAH DIBERIKAN

DALAM URUSAN KOPERASI DAN UKM, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. PADA TAHUN 2008 PEMBINAAN TERHADAP INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DIARAHKAN DAN DIPRIORITASKAN PADA SEKTOR-SEKTOR YANG POTENSIAL BAIK DARI SEGI POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG TELAH

DIMANFAATKAN MAUPUN YANG BELUM DIMANFAATKAN, SUMBER DAYA MANUSIA, MAUPUN PELUANG PASAR. PEMBINAAN AKAN LEBIH DIINTENSIFKAN DAN BERKELANJUTAN DI TAHUN-TAHUN MENDATANG YANG AKAN DILAKUKAN DALAM RENTANG WAKTU TERTENTU, IDEALNYA 2 S/D 5 TAHUN DENGAN POLA PENDAMPINGAN.

2. MELALUI PROGRAM DARI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN BEKERJASAMA DENGAN JICA JEPANG, PADA TAHUN 2008, KABUPATEN SAMBAS DIBERIKAN KESEMPATAN MENGIRIM SALAH SATU STAF UNTUK DILATIH MENJADI TENAGA KONSULTAN YANG AKAN MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP INDUSTRI KECIL MENENGAH. DENGAN ADANYA KESEMPATAN INI, KEDEPAN DIHARAPKAN PEMBINAAN TERHADAP INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH SERTA INDUSTRI RUMAH TANGGA MENJADI LEBIH TERENCANA, TERARAH DAN PROFESIONAL.
3. DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN JUS JERUK SAMBAS, TELAH DIBERIKAN BANTUAN BERUPA PENDINGIN MAKANAN DAN MINUMAN SEBANYAK

3 UNIT. SEDANGKAN UNTUK MELINDUNGI HASIL KERAJINAN TENUN, TELAH DILAKUKAN UPAYA MEMPATENKAN MOTIF-MOTIF TENUN YANG DICIPTAKAN OLEH PERAJIN TENUN SAMBAS DENGAN CARA MELAKUKAN PENDAFTARAN HAKI TERHADAP 8 (DELAPAN) MOTIF MODIFIKASI TENUN SAMBAS. SELAIN ITU, DALAM UPAYA MENEROBOS PELUANG PASAR UNTUK PRODUK UNGGULAN DAERAH, TELAH DILAKUKAN PENDAFTARAN NOMOR DEPES TERHADAP BEBERAPA PRODUK.

DALAM URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TERUS MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP MASYARAKAT PERIKANAN BAIK NELAYAN LAUT DAN UMUM MAUPUN PEMBUDIDAYA. SALAH SATUNYA ADALAH MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DENGAN MELAKUKAN PATROLI LAUT UNTUK MENGURANGI KONFLIK ANTAR NELAYAN LAMDAS DAN NELAYAN KECIL.

2. DALAM MENGEMBANGKAN ARMADA PERIKANAN YANG LEBIH LAYAK, TELAH DITINGKATKAN KAPASITAS NELAYAN YANG SEMULA PERAHU TANPA MOTOR DITINGKATKAN MENJADI MOTOR TEMPEL DAN NELAYAN MOTOR TEMPEL MENJADI NELAYAN KAPAL MOTOR DENGAN MENGADAKAN MESIN KAPAL MOTOR SEBANYAK 100 UNIT DAN MENDIRIKAN SPDN.
3. PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIPEROLEH DARI SEKTOR KELAUTAN PADA TAHUN 2007 MENCAPAI RP. 1.142.792.899. AGAR PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR INI LEBIH FOKUS DAN TERARAH, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS MENYAMBUUT BAIK PENGKAJIAN UNTUK MEMBENTUK PERUSAHAAN DAERAH YANG BERGERAK DALAM BIDANG PERIKANAN LAUT.

DALAM URUSAN PERTANIAN, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. POLA PERTANIAN TERPADU SUDAH MULAI DIKEMBANGKAN SEJAK TAHUN 2007 WALAUPUN DALAM SKALA KECIL BERUPA DEMONSTRASI PLOT

DI BEBERAPA KECAMATAN UNTUK MENGENALKAN KEPADA PETANI TENTANG CARA PEMBUATAN, PENGGUNAAN DAN MANFAAT PUPUK ORGANIK, SERTA DAMPAK PUPUK KIMIA DALAM JANGKA PANJANG. UNTUK SETERUSNYA PEMAKAIAN PUPUK ORGANIK MENGGUNAKAN BOKASI JUGA DITERAPKAN PADA LOKASI SL-PTT PADA 560 KELOMPOK TANI. SELAIN ITU, JUGA DILAKUKAN PENGENDALIAN TANAMAN JERUK DENGAN MENGGUNAKAN BUBUR CALIFORNIA. SEDANGKAN PENGENDALIAN TANAMAN DENGAN MENGGUNAKAN PESTISIDA NABATI DAN AGEN HAYATI MASIH DALAM TAHAP SOSIALISASI.

2. SETIAP TAHUN GUBERNUR MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) UNTUK SELANJUTNYA DIJABARKAN DALAM KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS YANG DIRINCI PER KECAMATAN DAN PER BULAN DALAM SATU TAHUN.
3. DALAM MENGAWASI DAN MENGONTROL DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI, AKAN DIAKTIFKAN PERAN DARI KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KOMPES) UNTUK TINGKAT

KABUPATEN DALAM BENTUK KEPUTUSAN BUPATI. DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK TERBUKA UNTUK SEMUA PENGUSAHA BAIK SWASTA MAUPUN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

DALAM URUSAN KEHUTANAN, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. LUAS HUTAN DI KABUPATEN SAMBAS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 259/KPTS-II/2000 TANGGAL 23 AGUSTUS 2000 TENTANG PENUNJUKAN WILAYAH HUTAN DAN PERAIRAN KALIMANTAN BARAT ADALAH SELUAS 191.803 HA YANG TERDIRI DARI HUTAN KONSERVASI SELUAS 25.558 HA, HUTAN LINDUNG SELUAS 22.599 HA, HUTAN LINDUNG BAKAU SELUAS 7.720 HA, HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS 10.195 HA, HUTAN PRODUKSI SELUAS 100.844 HA DAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI SELUAS 24.565 HA. HUTAN DI KABUPATEN SAMBAS SEBAGIAN BESAR MERUPAKAN HUTAN SEKUNDER YANG TELAH DIEKSPLORASI PADA TAHUN 1980-AN DAN BERAKHIR PADA TAHUN 1997. POTENSI HUTAN

YANG DIMILIKI SAAT INI SEBESAR 20 M<sup>3</sup>/HA YANG DIDOMINASI OLEH JENIS SHOREA SPP.

2. KAWASAN HUTAN KABUPATEN SAMBAS TERBAGI DALAM 3 SUB DAS YAITU SEBANGKAU, SAMBAS DAN PALOH. PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TELAH MEMBUAT RENCANA TEKNIK LAPANGAN UNTUK KEGIATAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH PADA TAHUN 1999/2000 UNTUK SUB DAS SAMBAS DAN TAHUN 2003 UNTUK SUB DAS SEBANGKAU. UNTUK PEMBUATAN MASTER PLAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAN RENCANA TEKNIK LAPANGAN SERTA REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH UNTUK SUB DAS PALOH BELUM BISA DIREALISASIKAN DIKARENAKAN KETERBATASAN ANGGARAN.
3. KONVERSI HUTAN TROPIS YANG HETEROGEN MENJADI KAWASAN HUTAN MONOKULTUR DAPAT TERJADI PADA KAWASAN HUTAN YANG TELAH DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU – HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) YANG KEWENANGANNYA BERADA PADA MENTERI KEHUTANAN. SEMENTARA YANG TELAH DIBERIKAN IZIN HTI DI KABUPATEN

SAMBAS OLEH MENTERI KEHUTANAN ADALAH PT. BUMI MEKAR HIJAU YANG AREAL KERJANYA BERADA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SELAKAU - SUNGAI SEBANGKAU (KECAMATAN SELAKAU TIMUR DAN TEBAS) DAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI SEBUBUS (KECAMATAN TELUK KERAMAT, TANGARAN DAN JAWAI) DENGAN LUAS AREAL KESELURUHAN ADALAH 24.050 HA. SEDANGKAN YANG SEDANG DALAM PROSES PEMBAHASAN ADALAH PT. FAJAR WANA LESTARI DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI PALOH DI KECAMATAN PALOH DAN KECAMATAN SAJINGAN BESAR SELUAS 22.180 HA. DALAM KEGIATAN HTI ADA LOKASI YANG DIPERUNTUKAN UNTUK PELESTARIAN JENIS-JENIS HUTAN TROPIS LOKAL, TANAMAN KEHIDUPAN DAN TANAMAN KOMERSIAL.

4. KONVERSI KAWASAN HUTAN PRODUKSI MENJADI KAWASAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SAMBAS SECARA RESMI BELUM ADA MENGGINGAT PROSES KONVERSI KAWASAN TERSEBUT HARUS DENGAN IZIN MENTERI KEHUTANAN YANG SEBELUMNYA HARUS TELAH DIREKOMENDASI DPR REPUBLIK INDONESIA.

5. PROYEK PEMBANGUNAN YANG BERDAMPAK LANGSUNG TERHADAP LINGKUNGAN TELAH DIUPAYAKAN MELALUI TAHAP AMDAL (ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN) SEHINGGA SEGALA AKTIFITAS PEMBANGUNAN YANG AKAN BERLANGSUNG TIDAK AKAN MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP PENYEBARAN HUTAN TROPIS SELAMA PERUSAHAAN BERGERAK SESUAI DENGAN AMDALNYA. KEDEPANNYA AKAN DILAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN OLEH PERUSAHAAN AGAR SESUAI ATURAN LINGKUNGAN SERTA MEMBERIKAN TINDAKAN TEGAS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELANGGAR.

DALAM URUSAN PERKEBUNAN, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TETAP KONSISTEN DALAM MENGEMBANGKAN KOMODITAS PERKEBUNAN UNGULAN ANTARA LAIN KARET UNTUK WILAYAH PEDALAMAN DAN KELAPA DALAM UNTUK WILAYAH PESISIR

PANTAI. HAL INI TERCERMIN DARI REKAPITULASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN BERBAGAI SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN BAIK DARI DANA APBD KABUPATEN, APBD PROPINSI, APBN MAUPUN DANA SWADAYA MASYARAKAT.

2. PERIZINAN KELAPA SAWIT KHUSUSNYA IZIN USAHA PERKEBUNAN MERUPAKAN LANJUTAN DARI PROSES PERMOHONAN IZIN YANG TELAH BERJALAN SEJAK TAHUN SEBELUMNYA, YANG DIMULAI DARI INFORMASI LAHAN, KEMUDIAN SETELAH ADANYA REKOMENDASI GUBERNUR DILANJUTKAN DENGAN PENETAPAN IJIN LOKASI. SETELAH MELAKUKAN STUDI AMDAL, MAKA DITERBITKAN IJIN USAHA PERKEBUNAN YANG DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN HAK GUNA USAHA.

DALAM URUSAN INDUSTRI, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. SETIAP TAHUN DUKUNGAN TERHADAP INDUSTRI KECIL MENENGAH DILAKSANAKAN DALAM BENTUK BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI, BANTUAN PERALATAN DAN KEMASAN

BERDASARKAN USULAN-USULAN YANG DIPEROLEH MELALUI MUSRENBANG KABUPATEN DAN KECAMATAN ATAU LANGSUNG DARI MASYARAKAT. DI SEKTOR INDUSTRI PANGAN, PADA TAHUN 2008 TELAH DILAKUKAN PELATIHAN PEMBUATAN MANISAN DARI KULIT JERUK BALI (KURMELO), FASILITASI PENYALURAN SUBSIDI KEDELAI DAN BANTUAN TUNGKU, KAWAH DAN BANGSAL PEMBUATAN GULA TEBU.

DI SEKTOR INDUSTRI KERAJINAN, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BEKERJASAMA DENGAN UII YOGYAKARTA PADA TAHUN 2008 MELAKUKAN PELATIHAN DIVERSIFIKASI PRODUK ANYAMAN PANDAN. SELAIN ITU, DIADAKAN PELATIHAN PEMBUATAN KERANJANG BAMBU UNTUK PENGEMASAN JERUK SERTA MENGIKUTI PAMERAN KERAJINAN INTERNASIONAL (INACRAFT) DAN PAMERAN GELAR TENUN NASIONAL DALAM RANGKA MENEROBOS PASAR DAN PROMOSI.

DI SEKTOR INDUSTRI PERKEBUNAN, UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI KARET DAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KARET, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TELAH

MEMBERIKAN BANTUAN PERALATAN PRESS KARET SEBANYAK 4 SET.

DALAM URUSAN PEKERJAAN UMUM, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. UNTUK MENINGKATKAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN, AGAR LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING BIDANG SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.
2. DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG UJI MUTU JASA KONSTRUKSI, UNTUK PENGADAAN BANGUNAN / KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS MEWAJIBKAN UJI MATERIL KONSTRUKSI YANG DITUANGKAN DALAM DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (KONTRAK).
3. DALAM MEMPERLANCAR PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, PEMBUKAAN JALAN LINGKUNGAN PEDESAAN MENJADI PRIORITAS PERTAMA PADA TAHUN 2010, TERMASUK JALAN LINGKUNGAN MENUJU FASILITAS UMUM SEPERTI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.

4. UNTUK MENGATASI PENDANAAN PEMBANGUNAN RUAS JALAN KABUPATEN DAN DAERAH-DAERAH YANG TERISOLIR, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TERUS BERUPAYA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROPINSI MAUPUN PUSAT SERTA MENYAMPAIKAN USULAN PEMBANGUNAN.

DALAM URUSAN PENATAAN RUANG DAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. TUJUAN DARI PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH ADALAH MEWUJUDKAN RUANG WILAYAH KABUPATEN YANG MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DENGAN SENANTIASA BERWAWASAN LINGKUNGAN, EFISIENSI DALAM ALOKASI INVESTASI, BERSINERGI DAN DAPAT DIJADIKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2007 DALAM URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN URUSAN PENATAAN RUANG TELAH MELAKSANAKAN AMANAH UNDANG-UNDANG

NOMOR 26 TAHUN 2007. ADAPUN PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG SEBAGAI *OUTCOMES* DILAKUKAN OLEH INSTANSI TEKNIS, SEPERTI PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERKANTORAN YANG BERDASARKAN PADA DESAIN KAWASAN PERKANTORAN, PEMBANGUNAN JALAN YANG BERDASARKAN JARINGAN PRASARANA YANG MERUPAKAN PRODUK TATA RUANG.

SELAIN ITU, TELAH DILAKUKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN SOSIALISASI DALAM BENTUK SEMINAR MAUPUN BILLBOARD DI BEBERAPA KECAMATAN.

DALAM URUSAN PERUMAHAN, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. TERHADAP PERSOALAN PERUMAHAN PENDUDUK MISKIN, TELAH DILAKUKAN UPAYA DENGAN MENGINVENTARISASI RUMAH-RUMAH / DAERAH MISKIN DAN DIUSULKAN UNTUK KEGIATAN RENOVASI RUMAH MELALUI DANA STIMULUS FISKAL DAN DANA BANTUAN BENCANA ALAM.
2. TERHADAP PERSOALAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH, TELAH DIANGGARKAN DANA BAIK DARI

DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, MAUPUN APBN AD HOC, SEKALIPUN JUMLAHNYA MASIH TERBATAS. KARENA ITU, TELAH DIUSULKAN PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI DANA STIMULUS FISKAL DAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN. SELAIN ITU, TELAH DILAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROPINSI UNTUK PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN SAMBAS, YAITU PENGELOLAAN AIR BAKU IKK SAMBAS DI RIAM CEGAT, SAJINGAN BESAR.

DALAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. DALAM KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PADA TAHUN 2007, ALAT-ALAT ANGKUT PERSAMPAHAN YANG DIADAKAN ADALAH GEROBAK SAMPAH SEBANYAK 7 BUAH, TONG SAMPAH SEBANYAK 113 BUAH, PENGGUSURAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SEBANYAK 1 PAKET, DAN PENYEDIAAN PAKAIAN KERJA. PENGADAAN

INI UNTUK MENDUKUNG KEMAMPUAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG MENCAIPI 28 M<sup>3</sup> PER HARI YANG BERASAL DARI KECAMATAN SAMBAS, PEMANGKAT, TEBAS, TELUK KERAMAT DAN JAWAI.

2. PASCA MASUKNYA INVESTASI DI BIDANG PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN, PADA TAHUN 2009 AKAN DILAKSANAKAN INVENTARISASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP.
3. PEMANFAATAN ALAT-ALAT LABORATORIUM DAPAT DIFUNGSIKAN PADA TAHUN 2009, DIMANA BANGUNAN LABORATORIUM INI TELAH DIBANGUN PADA TAHUN 2008. KEDEPAN, AKAN DIUPAYAKAN AGAR DALAM PEMANFAATAN ALAT-ALAT LABORATORIUM INI DAPAT MENAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). SELAIN ALAT-ALAT, TENAGA LABORATORIUM INI JUGA TELAH DISIAPKAN, DENGAN MENGIRIM 2 ORANG UNTUK MENGIKUTI MAGANG SELAMA 14 HARI DI LABORATORIUM MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DI SERPONG.
4. SESUAI DENGAN AMDAL PERTAMBANGAN, HINGGA TAHUN 2008 DI KABUPATEN SAMBAS

TERDAPAT 1 (SATU) PERUSAHAAN YANG SUDAH SELESAI MELAKSANAKAN AMDAL, YAITU PT ENERGI KARYA KARIZA DI KECAMATAN PALOH. NAMUN PERUSAHAAN INI BELUM MELAKSANAKAN KEGIATAN KARENA MENUNGGU PROSES PINJAM PAKAI KAWASAN DENGAN MENTERI KEHUTANAN, SEHINGGA DAMPAK PENCEMARAN BAHAN BERBAHAYA DARI KEGIATAN PERTAMBANGAN INI BELUM ADA.

DALAM URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. MENYIKAPI PERSOALAN KELANGKAAN LISTRIK, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS SEJAK TAHUN 2004 TELAH BERUSAHA MENGANTISIPASI DENGAN MENGADAKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) UNTUK DESA-DESA YANG BELUM TERJANGKAU JARINGAN LISTRIK. SAAT INI DIUPAYAKAN UNTUK MEWUJUDKAN DESA ENERGI MANDIRI, YAITU DESA YANG MEMILIKI SUMBER ENERGI ALTERNATIF UNTUK KEPENTINGAN WILAYAH ITU.

KOORDINASI DENGAN PT PERTAMINA VI UNIT PEMASARAN PONTIANAK SELALU DILAKUKAN TERKAIT KETERSEDIAAN MINYAK TANAH DAN BENSIN / SOLAR. SELAIN ITU, PENGECEKAN LANGSUNG KE LAPANGAN JUGA SELALU DILAKUKAN.

2. PENAMBAHAN JUMLAH KUOTA UNTUK MIGAS BAIK DI SPBU MAUPUN DI PANGKALAN MINYAK TANAH SUDAH DIATUR DALAM PERJANJIAN KONTRAK ANTARA PIHAK PERTAMINA DAN PERUSAHAAN MIGAS. IDEALNYA KABUPATEN SAMBAS MEMILIKI SATU ATAU DUA BANGUNAN SPBU UNTUK MENG-COVER WILAYAH HULU. UNTUK MINYAK TANAH AKAN DIKONVERSIKAN KE GAS ELPIJI 3 KG SESUAI ARAHAN PEMERINTAH, YANG PELAKSANAANNYA DI KALIMANTAN BARAT DIRENCANAKAN PADA TAHUN 2010.
3. ANTISIPASI TERJADINYA KELANGKAAN MIGAS, PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TELAH MENGAJUKAN PROPOSAL KEPADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK PEMBANGUNAN TEKNOLOGI BIOGAS YANG SUMBERNYA BERASAL DARI KOTORAN SAPI KARENA POTENSINYA DI KABUPATEN SAMBAS

CUKUP BESAR. DI TINGKAT PUSAT, SAAT INI SEDANG DALAM TAHAP NEGOSIASI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN BELANDA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF INI.

4. PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN UMUM, YANG AKAN DISEMPURNAKAN KEMBALI KARENA TERDAPAT PERUBAHAN PADA UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN. SEMENTARA UNTUK MELAKSANAKAN AMANAH UNDANG-UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN, AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN PEMBUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ENERGI DAN MIGAS.
5. UNTUK PENYULUHAN BAGI PELAKU PERTAMBANGAN DILAKUKAN LANGSUNG DI LAPANGAN, BAIK ADMINISTRASI MAUPUN TEKNIS PENAMBANGAN LINGKUNGAN YANG BAIK.

DALAM URUSAN PARIWISATA, TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH :

1. UPAYA-UPAYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENUNJANG PARIWISATA ANTARA LAIN PEMBANGUNAN JALAN MASUK, REHAB JALAN DAN PEMBANGUNAN MUSHOLLA OBJEK WISATA DANAU SEBEDANG, PENERASAN JALAN MASUK OBJEK WISATA PANTAI PUTRI SERAI DI KECAMATAN JAWAI SELATAN, PEMBANGUNAN TANGGA MASUK MAKAM DATO' KULUP, PEMBANGUNAN TANGGA MAKAM BUJANG NADI DARE NANDUNG, SERTA PEMBANGUNAN *HOME STAY* DAN MUSHOLLA DI OBJEK WISATA SELIMPAI.
2. PERENCANAAN ATAU *GRAND DESIGN* OBJEK WISATA YANG SUDAH DILAKUKAN ANTARA LAIN PANTAI PUTRI SERAI KECAMATAN JAWAI SELATAN PADA TAHUN 2006, PANTAI SINAM KECAMATAN PEMANGKAT DAN DANAU SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI PADA TAHUN 2008 SERTA BATU BEJAMBAN KECAMATAN PALOH YANG DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2009.
3. BEBERAPA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) UNGGULAN KABUPATEN SAMBAS ADALAH ISTANA ALWATZIKOEBILLAH, DANAU

SEBEDANG, PANTAI PUTRI SERAI, PANTAI TANJUNG BATU, PANTAI SINAM, PANTAI SELIMPAL, DAN AIR TERJUN RIAM MERASAP.

4. PROMOSI DAN KALENDER EVENT OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN SAMBAS TELAH DILAKUKAN MELALUI SITUS [www.Sambas.go.id](http://www.Sambas.go.id), YANG SECARA BERTAHAP AKAN DITINGKATKAN INTENSITASNYA.

#### **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT**

SELANJUTNYA SAYA AKAN MENYAMPAIKAN PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN YANG DIALAMI DALAM UPAYA MENCAPAI VISI TERPIKAT MELALUI PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, RELIGIUS, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT.

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI YANG MERUPAKAN SALAH SATU STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT TELAH MEMBERIKAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI YANG SECARA MAKRO DICERMINKAN OLEH PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA YANG DIKUTI LAJU

PERTUMBUHAN EKONOMI SETIAP TAHUNNYA ATAU DENGAN KATA LAIN TERJADI PERKEMBANGAN PDRB YANG CUKUP TINGGI.

BERDASARKAN ANGKA SEMENTARA, PDRB KABUPATEN SAMBAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU PADA TAHUN 2007 SEBESAR RP. 4.151 MILIAR DAN MENINGKAT MENJADI SEBESAR RP. 4.746 MILIAR PADA TAHUN 2008. SEDANGKAN PDRB KABUPATEN SAMBAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN PADA TAHUN 2008 SEBESAR RP. 2.491 MILIAR MENJADI RP. 2.629 MILIAR PADA TAHUN 2008. HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA SECARA RIIL PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SAMBAS PADA TAHUN 2008 SEBESAR 5,51 %. JIKA DILIHAT MENURUT PDRB PERKAPITA, PDRB KABUPATEN SAMBAS ATAS HARGA BERLAKU SEBESAR RP. 9.678.627,-, NAIK SEBESAR 13,17 % DIBANDING TAHUN 2007. SEDANGKAN PDRB PERKAPITA ATAS HARGA KONSTAN SEBESAR RP. 5.360.764 ATAU TUMBUH SEBESAR 4,38 % DIBANDING TAHUN 2007.

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SAMBAS PADA TAHUN 2008 DIDUKUNG OLEH SEKTOR

BANGUNAN / KONSTRUKSI DENGAN PERTUMBUHAN SEBESAR 10,82 %, SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN SEBESAR 10,43 %, SEKTOR JASA SEBESAR 8,28 %, SEKTOR KEUANGAN SEBESAR 6,80 %, SEKTOR LISTRIK DAN AIR MINUM SEBESAR 6,59 %, SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI SEBESAR 6,02 %, SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN SEBESAR 5,73 %, SEKTOR PERTANIAN SEBESAR 4,96 %, DAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SEBESAR 3,98 %.

HINGGA TAHUN 2008 SEKTOR PERTANIAN MERUPAKAN SEKTOR TERBESAR DALAM PEMBENTUKAN PDRB KABUPATEN SAMBAS, YAITU SEBESAR 43,11 %, DISUSUL SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN SEBESAR 28,95 %, INDUSTRI PENGOLAHAN SEBESAR 10,47 %, DAN SEKTOR LAINNYA SEBESAR 17,47 %. SEJALAN DENGAN HAL INI, SEBAGAI APRESIASI PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PADA BULAN DESEMBER 2008 PEMERINTAH MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS SEBAGAI SALAH SATU KABUPATEN YANG MAMPU MENINGKATKAN PRODUKSI PADI DIATAS 5 % SETAHUN.

PENGHARGAAN INI DITERIMA ATAS PENINGKATAN PRODUKSI PADI DARI TAHUN 2006 SEBESAR 239.805 TON GKG MENJADI 254.610 TON GKG PADA TAHUN 2007 ATAU MENINGKAT SEBESAR 6,17 %.

PEMBANGUNAN SEKTOR AGAMA SEBAGAI PERWUJUDAN VISI TERPIKAT YAKNI RELIGIUS DAN AKHLAKUL KARIMAH DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA, PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENYULUH AGAMA, KUALITAS PENATAAN DAN PENGELOLAAN SERTA PENGEMBANGAN FASILITAS RUMAH IBADAH DAN PELAKSANAAN IBADAH, PEMBINAAN KELUARGA SEBAGAI LANGKAH UNTUK MENEMPATKAN KELUARGA SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBENTUKAN MORAL DAN ETIKA, PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN, KUALITAS PELAYANAN TERHADAP JEMAAH HAJI DAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DIBIDANG KEAGAMAAN INI DILAKUKAN SECARA BERSAMA DENGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA DAN ORGANISASI

KEAGAMAAN YANG ADA DI KABUPATEN SAMBAS. PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN KEAGAMAAN INI DIANTARANYA TAMPAK PADA KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI. HAL INI TERGAMBAR PADA DAFTAR CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN SAMBAS SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 SEBANYAK 1.745 ORANG.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 SELANJUTNYA ADALAH PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS. PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT DIUPAYAKAN UNTUK TERUS MENINGKATKAN *HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (HDI) KABUPATEN SAMBAS YANG MASIH DIJADIKAN SEBAGAI INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT. PENINGKATAN ANGKA HDI INI DIARAHKAN PADA UPAYA PERBAIKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

LEBIH LANJUT PERBAIKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DIARAHKAN PADA PENINGKATAN MUTU, PERLUASAN JANGKAUAN DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN. ADAPUN PROGRAM POKOK

YANG DILAKUKAN BERUPA PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT, PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA, LANSIA DAN PENDUDUK MISKIN, PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN, PENYEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR, PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN, SERTA PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA.

UNTUK PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT TELAH DILAKUKAN PENYUSUNAN PETA INFORMASI MASYARAKAT KURANG GIZI, PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN KEPADA BALITA GIZI BURUK SEBANYAK 30 ORANG, PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN, ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY), PENANGGULANGAN KEKURANGAN VITAMIN A SERTA KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA. SEDANGKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI

PENDUDUK MISKIN TELAH DILAKUKAN MELALUI PELAYANAN OPERASI BIBIR SUMBING SEBANYAK 40 ORANG DAN SUNATAN MASSAL SEBANYAK 150 ANAK. SEMENTARA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DILAKUKAN DENGAN IMUNISASI, PENYEMPROTAN (FOGGING) SEBELUM MASA PENULARAN PADA 23 LOKASI DALAM MENANGGULANGI KASUS DEMAM BERDARAH, PELAYANAN VAKSINASI BAGI 50.000 BALITA, SERTA PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK / EPIDEMIK YAITU DEMAM BERDARAH PADA 50 DESA.

ASPEK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN OLEH RSUD SAMBAS, RSUD PEMANGKAT DAN PUSKESMAS SELAMA TAHUN 2008 TERCATAT UNTUK PASIEN RAWAT INAP SEBANYAK 11.489 ORANG DAN PASIEN RAWAT JALAN SEBANYAK 32.583 ORANG. SEMENTARA UNTUK PENANGGULANGAN PASIEN YANG TIDAK MAMPU ATAU KELUARGA MISKIN PENDANAANNYA DILIMPAHKAN KEPADA PT. ASKES. DISAMPING ITU PENDANAAN BIAYA PERAWATAN KESEHATAN

MASYARAKAT JUGA SEBAGIAN DILAKSANAKAN OLEH JPKMM.

PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN SEBAGAI PERWUJUDAN DARI VISI TERPIKAT TERIGAS YAITU ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS MELALUI PROGRAM PERLUASAN DAN PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN TERUTAMA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN, PENINGKATAN MUTU PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN DAN RELEVANSI PENDIDIKAN. HASIL RATA – RATA LULUSAN UNTUK TIAP JENJANG PENDIDIKAN PADA TAHUN 2008 DAPAT DILIHAT DARI NILAI EVALUASI MURNI (NEM) UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN) YAITU UNTUK SD/MI NEM RATA – RATA LULUSAN SEBESAR 6,11; SLTP/MTs SEBESAR 5,18; SMA SEBESAR 5,39; SMK SEBESAR 4,71 DAN MA SEBESAR 5,37.

KEBERHASILAN DALAM MENCAPAI NEM RATA – RATA SEBAGAI MANA TERSEBUT DI ATAS SANGAT DIPENGARUHI OLEH TINGKAT PENDIDIKAN YANG

DIMILIKI OLEH TENAGA PENGAJAR. DARI TINGKAT KELAYAKAN MENGAJAR, DENGAN ASUMSI BAHWA GURU YANG DIANGGAP LAYAK MENGAJAR MINIMAL BERPENDIDIKAN STRATA 1, MAKA DARI 4.279 ORANG GURU SD / MI YANG DIANGGAP LAYAK MENGAJAR SEBANYAK 298 ORANG (6,96 %), SEMENTARA YANG TIDAK LAYAK MENGAJAR SEBANYAK 3.981 ORANG (93,04 %). DENGAN ASUMSI YANG SAMA, TINGKAT KELAYAKAN MENGAJAR UNTUK GURU SLTP / MTS DARI 1.911 ORANG GURU ADALAH SEBANYAK 665 ORANG (33,40 %), SEDANGKAN YANG TIDAK LAYAK MENGAJAR SEBANYAK 1.242. ORANG (66,60). SEMENTARA TINGKAT KELAYAKAN MENGAJAR UNTUK GURU SLTA (SMA, SMK, MA) DARI 915 ORANG GURU ADALAH SEBANYAK 659 ORANG (72,02 %) DAN YANG TIDAK LAYAK MENGAJAR SEBANYAK 256 ORANG (27,98 %).

KHUSUS BAGI GURU YANG DIANGGAP TIDAK LAYAK MENGAJAR, SECARA BERTAHAP DIUPAYAKAN UNTUK MENGIKUTI KUALIFIKASI GURU MELALUI PROGRAM S-1 PGSD SERTA PROGRAM S-1 REGULER YANG DIBIYAI MELALUI PEMERINTAH KABUPATEN, PEMERINTAH MAUPUN SWADANA GURU

BERSANGKUTAN. PADA TAHUN 2008 GURU YANG MENGIKUTI PROGRAM TERSEBUT UNTUK S-1 GURU AGAMA SEBANYAK 80 ORANG, PGTK DANA PUSAT SEBANYAK 11 ORANG, S-1 GURU SD DANA PUSAT SEBANYAK 519 ORANG, S-1 GURU SD DANA DAERAH SEBANYAK 150 ORANG, S-1 REGULER / LANJUTAN DANA DAERAH (KHUSUS SMP) SEBANYAK 100 ORANG, DAN S-1 REGULER / LANJUTAN DANA PUSAT SEBANYAK 525 ORANG

PADA TAHUN 2008 CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) UNTUK PAUD SEBESAR 8,39 %; TK SEBESAR 9,04 %; SD SEBESAR 105,22 % MENURUN DIBANDINGKAN TAHUN 2007 SEBESAR 133,35 %, SLTP SEBESAR 88,02 % MENINGKAT DIBANDINGKAN TAHUN 2007 SEBESAR 78,70 % DAN SLTA SEBESAR 34,98 % MENINGKAT DIBANDINGKAN TAHUN 2007 SEBESAR 30,70 %.

SEDANGKAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) TAHUN 2008 UNTUK SD SEBESAR 97,33 % MENINGKAT DIBANDINGKAN TAHUN 2007 SEBESAR 96,01 %, SLTP SEBESAR 67,09 % MENINGKAT DIBANDINGKAN TAHUN 2007 SEBESAR 57,72 % DAN SLTA SEBESAR 20,16 %

MENURUN DIBANDINGKAN TAHUN 2007 SEBESAR 21,94 %.

UNTUK MENUNJANG KELANCARAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR (SD/SLTP) PADA TAHUN 2008 TELAH DISALURKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEBESAR RP. 24.106.683.000,00. DALAM PENYALURANNYA, DANA TERSEBUT DIALOKASIKAN UNTUK SISWA SD BULAN JANUARI S/D MARET 2008 SEBANYAK 394 SEKOLAH DENGAN JUMLAH 68.875 SISWA, BULAN APRIL S/D JUNI SEBANYAK 394 SEKOLAH DENGAN JUMLAH 68.814 SISWA, BULAN JULI S/D SEPTEMBER SEBANYAK 395 SEKOLAH DENGAN JUMLAH 69.199 SISWA DAN BULAN OKTOBER S/D DESEMBER SEBANYAK 396 SEKOLAH DENGAN JUMLAH 69.466 SISWA. SEDANGKAN ALOKASI SMP BULAN JANUARI S/D MARET 2008 SEBANYAK 96 SEKOLAH DENGAN JUMLAH 17.868 SISWA, BULAN APRIL S/D JUNI SEBANYAK 96 SEKOLAH DENGAN JUMLAH 17.857 SISWA, BULAN JULI S/D SEPTEMBER SEBANYAK 105 SEKOLAH DENGAN JUMLAH 19.181 SISWA DAN BULAN OKTOBER S/D DESEMBER SEBANYAK 104 SEKOLAH DENGAN JUMLAH 19.198 SISWA.

PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR TINGKAT SD JUGA DIDUKUNG DENGAN PEMBENAHAN FISIK BANGUNAN SEKOLAH. PADA TAHUN 2008, TELAH DILAKSANAKAN PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PUSAT SUMBER BELAJAR SD SEBANYAK 22 SEKOLAH, YAITU DI KECAMATAN SAMBAS, TELUK KERAMAT, PEMANGKAT, SEJANGKUNG DAN SEMPARUK MASING-MASING 3 SEKOLAH DASAR, DI KECAMATAN SELAKAU DAN SUBAH MASING-MASING 2 SEKOLAH DASAR, DAN DI KECAMATAN TEBAS, JAWAI DAN GALING MASING-MASING 1 SEKOLAH. KEMUDIAN JUGA TELAH DILAKSANAKAN PENGEMBANGAN SD STANDAR NASIONAL SEBANYAK 8 SEKOLAH DASAR YANG BERLOKASI DI KECAMATAN SAMBAS, SEBAWI, TELUK KERAMAT, JAWAI SELATAN, PEMANGKAT, GALING, SEMPARUK DAN SELAKAU.

DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, TELAH DILAKUKAN PENGEMBANGAN HASIL OLIMPIADE MIPA SD TAHUN 2008 YANG DILAKSANAKAN DI 23 SD, YAITU DI KECAMATAN SAMBAS SEBANYAK 10 SD, KECAMATAN TELUK KERAMAT SEBANYAK 6 SD, DAN KECAMATAN JAWAI

SELATAN SEBANYAK 7 SD. SELAIN ITU, TELAH DILAKUKAN PENGADAAN SARANA PEMBELAJARAN SAINS / IPA UNTUK 1 SD DI KECAMATAN TELUK KERAMAT SERTA PENGADAAN SARANA PEMBELAJARAN SD UNTUK 6 SD, YANG BERLOKASI DI KECAMATAN SEBAWI SEBANYAK 2 SD SERTA DI KECAMATAN PEMANGKAT, TELUK KERAMAT, JAWAI DAN SELAKAU MASING-MASING 1 SD.

UNTUK PENDIDIKAN DASAR TINGKAT SMP, TELAH DIBANGUN RUANG KELAS BARU SEBANYAK 16 RKB YANG BERLOKASI DI KECAMATAN SELAKAU, SUBAH, GALING, JAWAI DAN TELUK KERAMAT MASING-MASING 2 SMP SERTA DI KECAMATAN SAJINGAN BESAR, JAWAI SELATAN, SAJAD, SEBAWI, TEBAS DAN PALOH MASING-MASING 1 SMP. SELAIN ITU, TELAH DILAKUKAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SEBANYAK 10 SEKOLAH YANG BERLOKASI DI KECAMATAN PEMANGKAT DAN TEBAS MASING-MASING SEBANYAK 2 SMP SERTA DI KECAMATAN SELAKAU, JAWAI, TELUK KERAMAT, TEKARANG, SEMPARUK, DAN SUBAH MASING-MASING SEBANYAK 1 SMP.

DALAM UPAYA MENDUKUNG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR, TELAH DIBANGUN RUANG PERPUSTAKAAN UNTUK 2 SMP DI KECAMATAN TEBAS DAN PALOH, PEMBANGUNAN LABORARIUM UNTUK 2 SMP DI KECAMATAN SAMBAS DAN GALING, SERTA PENGADAAN SARANA MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK 3 SEKOLAH DI KECAMATAN PALOH, SAJAD DAN SUBAH.

UNTUK PENDIDIKAN MENENGAH, TELAH DIBERIKAN BLOCK GRANT PERALATAN SMK UNTUK 2 SEKOLAH DI KECAMATAN SAJINGAN BESAR DAN JAWAI SELATAN; BLOCK GRANT BKM SMK SEBESAR RP. 248.430.000 UNTUK 637 SISWA; BLOCK GRANT BKM SMA SEBESAR RP. 516.360.000 UNTUK 662 SISWA; BLOCK GRANT MUTU SMA UNTUK 6 SEKOLAH DI KECAMATAN TELUK KERAMAT SEBANYAK 2 SEKOLAH, SERTA KECAMATAN SAMBAS, TEBAS, SELAKAU DAN SEBAWI MASING-MASING 1 SEKOLAH;; PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER UNTUK 3 SMA YANG BERLOKASI DI KECAMATAN JAWAI SELATAN, SUBAH DAN TEKARANG; BLOCK GRANT SEKOLAH KATEGORI MANDIRI UNTUK 6 SEKOLAH YAITU 3 SMA DI KECAMATAN SAMBAS, SERTA

KECAMATAN PEMANGKAT, TEBAS, DAN JAWAI MASING-MASING 1 SMA; BLOCK GRANT RKB SMK SEBANYAK 2 SEKOLAH DI KECAMATAN SAMBAS DAN SELAKAU; PEMBANGUNAN USB SMA DI KECAMATAN TEBAS; BLOCK GRANT PEMBANGUNAN LABORATORIUM SMA UNTUK 2 SEKOLAH YANG BERLOKASI DI KECAMATAN SAMBAS DAN PALOH; PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN UNTUK 1 SEKOLAH DI KECAMATAN SEJANGKUNG; SERTA PENGADAAN SARANA MEDIA PEMBELAJARAN SMA UNTUK 1 SEKOLAH DI KECAMATAN TEKARANG.

#### **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT**

PADA TAHUN ANGGARAN 2008 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH MENGACU PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007. SELAIN ITU, PENYUSUNAN INI JUGA MENGACU PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS 2006 – 2011, SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2007.

SESUAI NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 181/378.b/BAPPEDA/2007 DAN NOMOR 170/200/DPRD/2007 TANGGAL 16 NOPEMBER 2007 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2008 TELAH DITETAPKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA TAHUN ANGGARAN 2008 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS.
  2. PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN DAN INVESTASI YANG SINERGIS.
  3. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR WILAYAH.
  4. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN.
- PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 TERSEBUT DIJABARKAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SESUAI

DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA MASING – MASING SEJUMLAH 120 PROGRAM DAN 334 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SEBESAR **RP. 312.794.375.173,45.**

SELANJUTNYA BERDASARKAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 181/357.B/BAPPEDA/2008 DAN NOMOR 170/229/DPRD/2008 TANGGAL 24 OKTOBER 2008 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA TAHUN ANGGARAN 2008 TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008 TERSEBUT DIJABARKAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA MASING – MASING SEJUMLAH 131 PROGRAM DAN 447 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SEBESAR **RP. 330.399.543.015,45-**

LEBIH LANJUT SESUAI KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007, FORMAT LKPJ KEPALA DAERAH YANG DISAMPAIKAN KEPADA DPRD DISAJIKAN PER URUSAN PEMERINTAHAN YANG MELIPUTI 26 URUSAN WAJIB DAN 8 URUSAN PILIHAN.

#### **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT**

BERIKUT INI SAYA SAMPAIKAN LAPORAN TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2008 DISUSUN BERDASARKAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) SERTA PLAFON DAN PRIORITAS ANGGARAN (PPAS). BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2008, APBD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 DITETAPKAN DENGAN KOMPOSISI SEBAGAI BERIKUT :

1. PENDAPATAN :  
RP.  
555.518.729.296,45

2. BELANJA	:	YANG HARUS DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
	RP.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN.
588.592.283.846,45		
DEFISIT	:	KEMUDIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
	RP.	KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2008
33.073.554.550,00		TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN SAMBAS
		TAHUN ANGGARAN 2008, TARGET PAD KABUPATEN
		SAMBAS MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR
3. PEMBIAYAAN		RP. 6.270.290.037,27,- DARI SEMULA RP.
a. PENERIMAAN	:	16.544.484.470,00,- MENJADI RP. 22.814.774.507,27,- ATAU
	RP.	MENINGKAT 37,90 %. PENINGKATAN TARGET PAD
33.098.554.550,00		TERSEBUT DISEBABKAN OLEH ADANYA
	:	PENINGKATAN TARGET PAJAK DAERAH SEBESAR
b. PENGELUARAN	:	RP. 145.271.785,00 ATAU NAIK 4,83 %, TARGET
	RP.	PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH MENINGKAT
25.000.000,00		SEBESAR RP. 3.409.086.925,00 ATAU NAIK 34,68 %, HASIL

MENGENAI DEFISIT DALAM APBD KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2008 SEBESAR RP. 33.073.554.550,00 DAPAT DIJELASKAN BAHWA DEFISIT ANGGARAN TERSEBUT BUKANLAH MERUPAKAN DEFISIT ANGGARAN DALAM ARTI YANG SESUNGGUHNYA MELAINKAN HANYA MERUPAKAN SEBUAH BENTUK SISTEM PENGANGGARAN, DIMANA TERJADI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU (SILPA TAHUN ANGGARAN 2007)

SEDANGKAN DARI DANA PERIMBANGAN JUGA MENINGKAT SEBESAR RP. 9.994.939.258,67 ATAU NAIK

SEBESAR 1,89 % YANG DIPEROLEH DARI BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK / SUMBER DAYA ALAM. SEDANGKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH MENINGKAT SEBESAR RP. 8.787.707.492,12 ATAU NAIK 89,80 % YANG BERASAL DARI BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DEARAH LAINNYA YANG NAIK SEBESAR RP. 2.233.403.773,12 ATAU NAIK SEBESAR 23,14 %, BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA MENJADI RP. 1.340.000.000,00, BAGI HASIL SUMBANGAN PIHAK III PROPINSI NAIK SEBESAR 14.577.919,00 ATAU 10,75 %, DANA PENYESUAIAN TUNJANGAN KEPENDIDIKAN MENJADI RP. 3.212.125.800,00 DAN DANA INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA MENJADI RP. 1.987.600.000,00.

DENGAN ADANYA PERUBAHAN APBD, MAKA SECARA KESELURUHAN TARGET ANGGARAN BELANJA MENJADI SEBESAR RP. 639.876.402.028,48 MENINGKAT SEBESAR RP. 51.284.118.182,03 ATAU NAIK 8,71 % DARI ANGGARAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN YAKNI SEBESAR RP. 588.592.283.846,45. DARI TOTAL PENINGKATAN ANGGARAN TERSEBUT DIARAHKAN UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP.

309.476.859.013,03 DAN BELANJA LANGSUNG SEBESAR RP. 330.399.543.015,45.

DISAMPING PENINGKATAN PADA PENDAPATAN DAN BELANJA, PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008 JUGA TERJADI PADA PEMBIAYAAN DAERAH. PENINGKATAN INI DIPEROLEH DARI PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2007 YANG SEMULA DITARGETKAN SEBESAR RP. 33.098.554.550,00 SETELAH DITETAPKANNYA PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2007 MENJADI SEBESAR RP. 60.495.081.183,97. SECARA KESELURUHAN KOMPOSISI PERUBAHAN APBD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PENDAPATAN	:	RP.
		580.571.666.084,51
2. BELANJA	:	RP.
		639.876.402.028,48
DEFISIT	:	RP.
		59.304.735.979,97

### 3. PEMBIAYAAN

a. PENERIMAAN	:
	RP.
60.755.729.183,97	
b. PENGELUARAN	:
	RP.
1.450.993.250,00	

REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 SEBESAR RP. 577.503.851.972,60 ATAU 99,47 % DARI TARGET YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 580.571.666.084,51. SECARA UMUM REALISASI PENDAPATAN DAERAH TELAH MELAMPAUI TARGET BILA DIBANDINGKAN DENGAN YANG DITARGETKAN SEBELUM PERUBAHAN 2008 SEBESAR RP. 555.518.729.296,45. REALISASI PENDAPATAN TERSEBUT BERSUMBER DARI PAD SEBESAR RP. 23.044.229.549,60 ATAU 101,01 % DARI TARGET SEBESAR RP. 22.814.774.507,27; DANA PERIMBANGAN SEBESAR RP. 533.650.566.367,00 ATAU 98,97 % DARI TARGET SEBESAR RP. 539.183.630.933; DAN REALISASI LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH SEBESAR RP. 20.809.056.056,00 ATAU 112,04 % DARI TARGET SEBESAR RP. 18.573.260.644,24.

BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS SEHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH ANTARA LAIN, YAITU :

- a. MASIH RENDAHNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DISEBABKAN OLEH BELUM BERKEMBANGNYA USAHA DI SEKTOR RIIL, DAN INVESTASI YANG LEBIH DIDOMINASI OLEH SEKTOR PERTANIAN.
- b. TERBATASNYA DANA PEMBANGUNAN YANG MENGAKIBATKAN TERBATASNYA PULA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN SEPERTI JALAN, JEMBATAN, DERMAGA, PENGAIRAN, DAN LAIN-LAIN.
- c. MASIH RENDAHNYA KESADARAN WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI YANG TELAH DITETAPKAN DAN BELUM MAKSIMALNYA UPAYA PENEGAKAN HUKUM (PEMBERIAN SANKSI) TERHADAP PELANGGAR HUKUM.
- d. BEBERAPA PERATURAN DAERAH DAN PETUNJUK PELAKSANAANNYA YANG SUDAH TIDAK LAGI RELEVAN DENGAN KONDISI SITUASI SAAT INI.

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA MENGATASI PERMASALAHAN DIMAKSUD DIANTARANYA, YAITU :

- a. TIDAK MENERAPKAN KEBIJAKAN YANG MEMBERATKAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT.
- b. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAPAT DITEMPUH MELALUI PENYEDERHANAAN SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, *LAW ENFORCEMENT* DALAM UPAYA MEMBANGUN KETAATAN WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH.
- c. PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS PEMUNGUTAN PANDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK TERCIPTANYA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI YANG DIBARENGI DENGAN PENINGKATAN KUALITAS, KEMUDAHAN, KETEPATAN DAN KECEPATAN PELAYANAN DENGAN BIAYA MURAH.

ADAPUN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 ADALAH SEBESAR **RP.**

**619.914.030.686,64** ATAU **96,88** %, DARI TARGET SEBESAR **RP. 639.876.402.018,48**. ADAPUN RINCIAN REALISASI BELANJA DAERAH TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG DAERAH TEREALISASI SEBESAR **RP. 302.084.801.504,64** ATAU **97,61** % DARI TARGET ANGGARAN SEBESAR **RP. 309.476.859.003,03**. REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TERSEBUT MELIPUTI :
  - BELANJA PEGAWAI TEREALISASI **RP. 265.390.242.952,00** ATAU **98,35** % DARI TARGET **RP. 269.828.687.671,03**.
  - BELANJA HIBAH TEREALISASI **RP. 2.019.427.500** ATAU **65,11** % DARI TARGET **3.101.427.500,00**.
  - BELANJA BANTUAN SOSIAL TEREALISASI **RP. 10.142.655.500,00** ATAU **88,79** % DARI TARGET **RP. 11.422.906.580,00**.
  - BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROPINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA TEREALISASI **RP. 580.805.400,00** ATAU **99,99** % DARI TARGET **RP. 580.821.500,00**.

➤ BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROPINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA TEREALISASI RP. 23.543.015.752,00 ATAU 100 %.

➤ BELANJA TIDAK TERDUGA TEREALISASI SEBESAR RP. 408.654.400,64 ATAU 40,86 % DARI TARGET RP. 1.000.000.000,00

SEMENTARA BELANJA BUNGA DAN BELANJA SUBSIDI PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2008 TIDAK DIANGGARKAN.

2. BELANJA LANGSUNG TEREALISASI SEBESAR **RP. 317.829.229.182,00** ATAU **96,19 %** DARI TARGET ANGGARAN SEBESAR **RP. 330.399.543.015,45**. REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT MELIPUTI :

➤ BELANJA PEGAWAI TEREALISASI RP. 24.932.274.342,00 ATAU 89,40 % DARI TARGET RP. 27.888.248.005,00.

➤ BELANJA BARANG DAN JASA TEREALISASI RP. 170.898.134.021,00 ATAU 96,44 % DARI TARGET RP. 177.193.252.318,45.

➤ BELANJA MODAL TEREALISASI RP. 121.998.820.819,00 ATAU 97,35 % DARI TARGET RP. 125.318.042.692,00.

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2008 TERDAPAT PERMASALAHAN YANG DIHADAPI, DIANTARANYA YAITU :

a. TINGGINYA KEBUTUHAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN KEPADA MASYARAKAT, YANG BELUM DIIMBANGI DENGAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH YANG MEMADAI.

b. KURANGNYA INFRASTRUKTUR PRASARANA DAN SARANA UMUM BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT SEPERTI JALAN, JEMBATAN, DERMAGA, IRIGASI, DAN SARANA DAN PRASARANA FISIK LAINNYA YANG SANGAT DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN DIBIDANG PEREKONOMIAN RAKYAT.

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA MENGATASI PERMASALAHAN DIMAKSUD DIANTARANYA, YAITU :

- a. PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR DAN KESEMPATAN KERJA.
- b. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PRASARANA DAN SARANA UMUM YANG DILAKUKAN SECARA BERTAHAP.
- c. MELAKUKAN PEMBANGUNAN YANG MENJADI PRIORITAS UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
- d. PELAKSANAAN BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN YANG TERDIRI DARI URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.

JIKA MENCERMATI ANGKA TARGET PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2008 MAKA DIDAPATKAN ADANYA SELISIH ANTARA TARGET PENDAPATAN DENGAN BELANJA DAERAH YANG SELANJUTNYA MENJADI DEFISIT ANGGARAN SEBESAR RP. 59.304.735.933,97. DEFISIT APBD KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2008

INI SELANJUTNYA DITUTUPI OLEH PENERIMAAN DAERAH DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2007 SEBESAR RP. 60.495.081.183,97. PEMBIAYAAN DAERAH YANG DIDAPAT DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2007 DISAMPING UNTUK MENUTUPI DEFISIT APBD TAHUN ANGGARAN 2008, PENERIMAAN DAERAH TERSEBUT JUGA DIALOKASIKAN UNTUK MEMBAYAR PENGELUARAN DAERAH SEBESAR RP. 1.450.993.250,00 YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS SEBESAR RP. 1.170.300.000,00, PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH SEBESAR RP. 25.000.000,00 DAN PEMBAYARAN KEGIATAN BELANJA SEBESAR RP. 255.693.250,00.

**SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA SERTA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA ;**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN YANG SAYA SAMPAIKAN INI MERUPAKAN GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS DAN STRATEGIS SELAMA TAHUN

ANGGARAN 2008 DALAM MENCAPAI VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, SEDANGKAN DATA RINCI MENGENAI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS TERSAJI PADA BUKU I YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NASKAH PIDATO INI.

DENGAN SEGALA KERENDAHAN DAN KETULUSAN HATI, KAMI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS SEBAGAI MANUSIA BIASA TENTUNYA TIDAK LUPUT DARI SEGALA KESALAHAN, KELEMAHAN DAN KETERBATASAN. NAMUN DEMIKIAN, KAMI TELAH BERUSAHA SECARA MAKSIMAL UNTUK MEMBANGUN KERJASAMA PADA SEMUA PIHAK GUNA MEWUJUDKAN VISI DAN MISI DAERAH MELALUI BERBAGAI KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN YANG PADA AKHIRNYA AKAN DAPAT MEWUJUDKAN TUJUAN AKHIR PEMERINTAHAN UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, PERKENANKAN JUGA SAYA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA SELURUH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMBAS YANG TERHORMAT ATAS SELURUH DUKUNGAN DAN KERJASAMA YANG BAIK SELAMA INI. KEMAJUAN DAN KEBERHASILAN YANG KITA CAPAI DAN HASILKAN PADA DAERAH KABUPATEN SAMBAS YANG TERCINTA INI MERUPAKAN BUAH KARYA DAN HASIL KERJA KERAS KITA BERSAMA. SEMOGA AMAL IBADAH SAUDARA DAN KITA SEMUA AKAN MENDAPAT IMBALAN PAHALA YANG MELIMPAH DARI ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA. AMIN.

KEPADA REKAN – REKAN MUSPIDA KABUPATEN SAMBAS, SAYA JUGA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN ATAS KERJASAMA, SARAN DAN BANTUAN YANG DIBERIKAN SELAMA INI. UCAPAN YANG SAMA JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, TOKOH / PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, INSAN PERS DAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS ATAS DUKUNGANNYA SELAMA INI. TAK LUPA PULA SAYA

SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA SELURUH JAJARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS DAN KEPALA DESA SE KABUPATEN SAMBAS SERTA SELURUH PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL ATAS DUKUNGAN DAN DEDIKASINYA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

WABILLAAHI TAUFIK WALHIDAYAH,  
WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI  
WABARAKAATUH.

\*\*\*

Bagian Humas, PDE dan Sandi  
Setda Kabupaten Sambas